

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PEGAWAI
SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM MENDUKUNG TUGAS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

**ASNA NURDIN
NPM : 91911403161013**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	6
B. Pengertian Sekertariat dan Pegawai Sekertariat DPRD	6
C. Pengertian Tugas Dan Fungsi.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	14
B. Sumber-sumber Penelitian.....	14
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	15
D. Metode Analisis Masalah	16
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Tentang Tugas dan Fungsi Pegawai Sekertariat DPRD	17
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pegawai Sekertariat DPRD Dalam Menjalankankan Fungsinya.....	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51



ABSTRACT

Asna Nurdin. NPM. 91911403161013. Juridical Review of the Duties and Functions of Regional People's Representative Council Secretariat Employees in Supporting the Duties of the Regional People's Representative Council. Supervised by Moh. Irfan Latowale and Albert Morangki.

Keywords : Regional People's Representative Council, Secretariat and Regional People's Representative Council Secretariat Employees

Employee performance affects how much they contribute to the organization. Employee performance is one of the factors that influence organizational progress. The higher or better the employee's performance, the easier the organizational goals will be achieved, and vice versa what happens if the employee's performance is low or not good, the planned activities cannot run well and the organization is difficult to achieve the goals that have been set. Employee performance can be measured from performance indicators which are benchmarks in the achievement of one's work.

The formulation of the problems in this study are 1. How is the regulation of the duties and functions of DPRD secretariat employees? 2. How are the obstacles faced by DPRD secretariat employees in carrying out their functions? In writing this thesis the author uses normative juridical research method, this research is conducted on legal materials and written regulations, books, literature and writings relevant to this thesis.

Regulations on the Duties and Functions of DPRD Secretariat Employees are clearly regulated in Poso Regent Regulation Number 12 of 2020 concerning Job Descriptions, Functions and Work Procedures of the Secretariat of the Regional People's Representative Council, Poso Regency Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning Organization and Work Procedures of the Regional Secretariat and the Secretariat of the Regional Representative Council. Where this regulation regulates the duties of each field in the DPRD secretariat where there is authority in each field that must be done by every employee in the DPRD secretariat. The obstacles faced by DPRD Secretariat employees in carrying out their functions are influenced by several factors, both supporting and inhibiting factors, one of the inhibiting factors is the availability of supporting facilities and infrastructure in the performance of DPRD Secretariat employees such as electronic devices such as computers, sound and others which are still very limited and mastery of these devices is still very lacking.

ABSTRAK SKRIPSI

Asna Nurdin. NPM. 91911403161013. Tinjauan Yuridis Tentang Tugas Dan Fungsi Pegawai Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mendukung Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di bimbing oleh Moh. Irfan Latowale dan Albert Morangki.

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekertariat dan Pegawai Sekertariat DPRD

Kinerja pegawai mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan organisasi. Semakin tinggi atau semakin baik kinerja pegawai maka tujuan organisasi semakin mudah dicapai, begitu pula sebaliknya yang terjadi apabila kinerja pegawai rendah atau tidak baik maka kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik dan organisasi sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja pegawai dapat diukur dari indikator kinerja yang merupakan tolok ukur dalam pencapaian kerja seseorang..

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan tentang tugas dan fungsi pegawai sekertariat DPRD? 2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh pegawai sekertariat DPRD dalam menjalankan fungsinya ? Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

Pengaturan Tentang Tugas dan Fungsi Pegawai Sekertariat DPRD secara jelas diatur dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kesekretariatan Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Daerah. Dimana aturan ini mengatur tentang tugas masing masing bidang dalam sekertariat DPRD dimana ada kewenangan dimasing-masing bidang yang harus dikerjakan oleh setiap pegawai yang ada di sekertariat DPRD. Kendala yang dihadapi oleh pegawai Sekertariat DPRD dalam menjalankan fungsinya antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat, salah satu faktor penghambat adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam kinerja pegawai sekertariat DPRD seperti perangkat elektronik misalnya komputer, sound dan lain lain yang masih sangat terbatas serta penguasaan perangkat tersebut yang masih sangat kurang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh sejauh mana tujuan organisasi yang telah direncanakan dapat dicapai baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. Untuk mencapai tujuan tersebut keterlibatan berbagai unsur dalam organisasi sangat penting, diantaranya unsur sumber daya manusia. Organisasi dituntut untuk dapat mengelola sumber daya manusia. Walaupun didukung oleh sarana dan prasarana yang baik namun tidak didukung oleh sumber daya manusia maka kegiatan dalam sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia merupakan penentu keberhasilan dalam sebuah organisasi. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang mampu bekerja lebih baik dan lebih cepat sehingga diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang tinggi. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi.

Kinerja pegawai mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan organisasi. Semakin tinggi atau semakin baik kinerja pegawai maka tujuan organisasi semakin mudah dicapai, begitu pula sebaliknya yang terjadi apabila kinerja pegawai rendah atau tidak baik maka kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik dan organisasi sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja pegawai dapat diukur dari indikator kinerja yang merupakan tolok ukur dalam pencapaian kerja seseorang.

Dengan adanya pengukuran kinerja pegawai, organisasi dapat mengetahui sejauh mana tingkat kinerja pegawai sehingga organisasi dapat memberikan umpan balik terhadap hasil pengukuran kinerja, mendorong perbaikan kinerja, dan pengambilan

keputusan sehingga organisasi memiliki sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dalam penilaian kinerja, dinyatakan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

Sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi berperan sebagai penggerak utama, dan penentu bagi keberhasilan atau kemajuan suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak instansi yang terkait demi tercapainya suatu tujuan, selain faktor Sumberdaya Manusia (SDM) tersebut banyak pula faktor-faktor lainnya yang harus pula diperhatikan, karena memang antara faktor yang satu dengan yang lainnya memiliki saling keterkaitan sehingga memiliki satu kesatuan.

Manusia sebagai penggerak organisasi, dalam era pembangunan nasional sangat dirasakan kehadirannya oleh organisasi. Seluruh keluaran organisasi tergantung dari prakarsa dan karya sumber daya manusia. Sehingga hampir disetiap masalah sumber daya manusia sebagai aparatur dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program. Sehingga berjalannya penyelenggaraan suatu organisasi secara efektif dan efisien sangat ditentukan oleh sumber daya manusia.

Untuk menghindari masalah yang akan muncul dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan prestasi kerja pegawai dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pemimpin instansi yang mampu mempengaruhi perilaku para pegawainya/bawahannya (staf), sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dapat membantu dan menyelesaikan tugas yang dilakukan bersama dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam era reformasi sekarang ini, seluruh perangkat hukum dan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan era reformasi perlu diganti atau ditinjau kembali dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Lembaga perwakilan rakyat juga tidak kuasa selama ini untuk menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Padahal DPRD mempunyai hak dan wewenang untuk mengkritisi pelaksanaan otonomi daerah pada setiap daerahnya. Selama ini pelaksanaan otonomi daerah tidak diberikan wewenang atau dilimpahkan secara penuh, bahkan berjalan setengah hati.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf yang diperbantukan adalah merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan oleh staf yang telah diperbantukan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang merupakan bagian dari pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Staf sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso, mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti yang telah dijelaskan diatas.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang tugas dan fungsi pegawai sekretariat DPRD?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh pegawai sekretariat DPRD dalam menjalankan fungsinya?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tugas dan fungsi pegawai sekretariat DPRD.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pegawai sekretariat DPRD dalam menjalankan fungsinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya pengaturan tentang fungsi pegawai sekretariat DPRD.

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa dalam menjalankan tugasnya pegawai sekretariat DPRD memiliki kendala-kendala dalam pelaksanaan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2005, Dasar-dasar Evaluasi Pegawai, Bumi Aksara, Jakarta,
- Danim Sudarwan, 2004, Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok, Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta
- Gomes, Faustin Cardoso, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan Keempat. Andi Offset, Yogyakarta.
- Handoko, Hani T, 2009, Manajemen, BPFE, Yogyakarta
- Mangkunegara Anwar, 2001 Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perusahaan. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moekijat, 1998. Analisis Jabatan, Mandar Maju, Bandung
- Simamora, Hendri, 2004 Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P, 2003, Teori dan Praktek Kepemimpinan. PT. Raja Grafindo, Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2007, Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta, Bandung.
- Kartono Kartini. 2002, Pemimpin dan Kepemimpinan Edisi Baru. PT Raja Grafindo. Persada Jakarta.
- Rachmawati,N,Eka,2004,Paradigma Baru Manajemen SDM, Ekonisia, Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu. S. P. 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winardi, 2000, Kepemimpinan dalam Manajemen, Rineka Cipta, Bandung.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Kesekretariatan Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Peraturan Bupati Poso Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Fungsi dan

Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah